

PUNAHNYA ETIKA MORAL ELIT POLITIK DI INDONESIA

Putu Ari Saruhum Hasibuan

hasibuanputu@gmail.com

Mei Indrawati

C. Sri Hartati

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRACT

The problem of corruption has reached its peak, the establishment of institutions that handle this case has carried out its functions well but the trend of corruption cases does not decrease every day but instead jumps sharply. vision, mission, goals become measurable and directed, political parties have a reconciliation process that can produce good politicians who are able to make political decisions or actions. The political elite prioritizes public interests and ethics. done and the corruption gap is closed.

Keywords: *moral ethics, responsibility, political elite*

ABSTRAK

Permasalahan korupsi sudah mencapai puncaknya, terbentuknya lembaga yang menangani kasus tersebut sudah menjalankan fungsinya dengan baik namun demikian trend kasus korupsi setiap hari bukan menurun tapi malah melonjak naik keatas tajam, penulisan ini hendak mendeskripsikan punahnya tanggung jawab etika moral elit politik di Indonesia bilamana seyogyanya mereka mempunyai pendidikan politik yang cukup sehingga visi, misi, tujuan menjadi terukur dan terarah, partai politik mempunyai proses rekrutmen yang baik dapat menghasilkan politisi yang kapabel harapan didalam mengambil keputusan atau tindakan politik seorang elit politik lebih mengedepankan kepentingan umum dan etika maka tanggung jawab moral terhadap masyarakat dapat dilakukan dan celah korupsi menjadi tertutup.

Kata kunci: etika moral, tanggung jawab, elit politik

PENDAHULUAN

Kejahatan Korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak henti-hentinya didalam kinerjanya melakukan operasi tangkap tangan terhadap transaksi penyuapan secara langsung hal ini tidak menjadikan pelajaran bagi pemerintahan, legislatif, lembaga negara, partai politik dan swasta sebagai rapot hitam dan menjadi potret buram agar tidak lagi melakukan tindakan korupsi.

Kasus korupsi didalam pemerintahan, antar lembaga negara maupun swasta dengan pemerintahan sudah banyak sekali menghiasi berita di Negara ini, terhadap pejabat Negara salah satunya kasus tertangkapnya Akil Muktar yang menjabat ketua mahkamah konstitusi, Suryadharma Ali menjabat menteri agama dan yang cukup fantastis adalah setya novanto selaku ketua DPR dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP

Banyaknya pejabat publik, tokoh partai politik yang tertangkap kasus korupsi menjadi tamparan yang keras terhadap kehidupan politik negara ini dan yang sangat ditakutkan adalah bilamana korupsi terus berlanjut dalam lingkaran kekuasaan akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena pada dasarnya kedaulatan tertinggi adalah ditangan rakyat, hal kedaulatan ini yang mungkin telah terlupakan terhadap pejabat pemerintahan, partai, legislatif, swasta bahwa tanggung jawab mereka paling utama adalah menjalankan amanat rakyat.

Tidak dapat kita pungkiri masyarakat Indonesia belum mempunyai pendidikan politik yang cukup hal ini ditenggarai dalam pemilihan umum masih terdapat politik uang. Transaksi ini biasa disebut *money politic* dikategorikan sebagai politik praktis yang menjadikan seseorang yang telah terpilih menjadi wakil rakyat nantinya akan berfikir bagaimana cara mengembalikan modal yang dikeluarkan pada waktu kampanye.

Namun demikian masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena seharusnya pelaku politik mengerti dan sadar bahwa melakukan politik uang adalah kurang beretika dan menimbulkan kerusakan sosial Rekrutan calon kepala daerah, legislatif, pejabat publik harus lebih diperhatikan kembali, dahulu untuk menjadi calon peserta pemilu umum sangatlah sulit karena harus melalui tahapan-tahapan salah satunya adalah menjadi anggota partai politik, namun demikian akhir-akhir ini partai politik membuka bebas lowongan terhadap siapa yang mau jadi calon legislatif tanpa melewati pelatihan atau pendidikan politik yang biasanya ada dalam program kerja partai.

Melihat realitas tersebut diatas sangat dimungkinkan terhadap pelaku politik tidak mempunyai etika sosial, wakil rakyat yang seharusnya menjalankan amanah rakyat saat ini berubah menjadi profesi kerja baru sehingga ketika lolos yang terjadi adalah persekongkolan, memperkaya diri dan kepentingan pribadi dan kelompok hal ini terjadi sebagai salah satu kasus yakni rombongan korupsi di kota malang pimpinan daerah atau

walikota dan hampir seluruh anggota legislatifnya saat ini meringkuk dalam tahanan KPK. Kasus korupsi di daerah ini menjadi keprihatinan bersama apakah mereka tidak berfikir bagaimana nasib masyarakat bilamana tidak berjalannya roda pemerintahan siapa yang paling dirugikan adalah masyarakat kota Malang.

ETIKA POLITIK

Etika Politik tidak hanya masalah perilaku politikus. Ia berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika Politik memiliki tiga dimensi : tujuan, sarana dan aksi politik itu sendiri. Perilaku politikus hanya salah satu dimensi etika politik. Kehendak baik perlu ditopang institusi yang adil. Kehendak baik berfungsi mempertajam makna tanggung jawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisir tanggung jawab.

Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Keprihatinan utama ialah upaya penerapan kebijakan umum dalam manajemen publik. Dalam Negara demokratis pemerintah mempunyai komitmen terhadap penyelenggaraan negara dan bertanggung jawab atas komitmen tersebut : kesejahteraan masyarakat dan hidup damai. Menghadapi masalah-masalah negara, kebijakan umum pemerintah harus terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode dan pendasaran filosofisnya. Lalu menjadi transparan apa yang harus dipertanggung jawabkan. Atas dasar kebijakan umum ini wakil rakyat dan

kelompok-kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi pelaksanaan, kinerja pemerintah dan menuntut pertanggung jawaban. Kejelasan tujuan yang terumus dalam kebijakan public akan menunjukkan ketajaman visi seorang pemimpin dan kepedulian suatu partai politik terhadap aspirasi masyarakat. Dimensi moralnya terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas kebijakan umum dan akuntabilitasnya.

Dimensi etika politik kedua ialah sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan. Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Hal yang terakhir ini ikut menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dasar. Pola-pola tersebut mengandung imperative normative yang disertai sanksi. Dimensi sarana ini mengandung dua pola normatif. Pertama, tatanan politik (hukum dan institusi) harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas; struktur sosial ditata secara politik menurut asas keadilan. Maka, asas kesamaan dan masalah siapa diuntungkan atau siapa dirugikan oleh hukum dan institusi tertentu relevan untuk dibahas; kedua kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai prinsip timbal balik. Dimensi moral pada tingkat sarana ini terletak pada peran etika dalam menguji dan mengkritisi legitimitas keputusan-keputusan, institusi-institusi dan praktik-praktik politik.

Dimensi ketiga, etika politik adalah aksi politik. Dalam dimensi etika ketiga ini pelaku memegang peran sebagai yang menentukan

rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku). Tindakan politik disebut rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Ini mengandaikan kemampuan mempersepsi kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan peta kekuatan politik yang ada. Disposisi kekuasaan ini membantu untuk memperhitungkan kemampuan dan dampak aksi politiknya. Menghindari kekerasan menjadi imperatif moral, maka penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik yang etis. Oleh karena itu, aksi mengandaikan keutamaan; penguasaan diri dan keberanian memutuskan serta menghadapi resikonya. Fair dan adil dalam hubungan dengan yang lain. Pada dimensi aksi ini, etika identik dengan tindakan yang rasional dan bermakna. Politik mempunyai makna karena memperhitungkan reaksi yang lain; harapan, protes, kritik, persetujuan, penolakan. Makna etis akan semakin dalam bila tindakan politikus didasari oleh bela rasa dan keberpihakan kepada yang lemah atau korban.

METODE PENULISAN

Didalam penulisan ini peneliti ingin memberikan gambaran metode yang actual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya. Metode yang digunakan bersifat penulisan kualitatif-deskriptif yaitu suatu penulisan yang bertujuan memberikan gambaran mengenai etika elit politik di Indonesia. Penulisan kualitatif adalah penulisan yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan dokumentasi yakni mengutip, mencatat data dari arsip-arsip yang mendukung serta literatur yang mendukung penulisan.

PEMBAHASAN

Maraknya pembukaan atau perekrutan secara umum terhadap calon legislatif maupun jabatan politik di eksekutif oleh partai politik menjadikan hal ini mengubah tatanan kaderisasi didalam tubuh partai. Kesempatan yang seharusnya diberikan kepada kader tulen yang benar-benar berangkat dari bawah akhirnya secara tidak langsung musnah akibat pergeseran rekrutmen saat ini. Siapa yang mempunyai popularitas, modal kuat dan kedekatan menjadi primadona tersendiri bagi partai politik tidak heran bila artis, pengusaha dan profesi lainnya secara massif berpindah profesi menjadi politikus.

Tak heran tanggung jawab moral para politisi yang dianggap karbitan ini sangat kurang bahkan dianggap tidak ada karena secara pasti mereka ini tidak mempunyai visi misi yang jelas terukur dan terarah sehingga jangankan berharap terjadi budaya santun politik yang ada malah sebaliknya mereka berlaku semaunya baik secara lisan maupun tindakan. Kalahnya beberapa artis dibebberapa Pemilu Kepala Daerah lalu seperti Dedi Miswar dan Dede Yusuf menunjukkan ketidakpuasan masyarakat atas program kerja pada waktu mereka pernah menjabat sebelumnya, selaras dengan teori diatas tujuan politisi

dimaksud urang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kedua, lebih parahnya lagi aturan-aturan yang diciptakan dan diberlakukan oleh para politisi ini seperti apa fasilitas yang akan didapat, bagaimana hajat hidup mereka bisa meningkat. Sementara untuk urusan rakyat dinomorduakan bahkan dikesampingkan, yang terpenting para politisi ini sudah lebih dulu berfikir untuk kesejahteraan mereka hal ini dapat dilihat dari permintaan pilihan mobil dinas, kebutuhan staf ahli, renovasi gedung belum lagi tunjangan-tunjangan yang nantinya harus mereka terima. Disamping itu moral yang terbangun adalah para pemangku kepentingan mempunyai hak atas pengelolaan keuangan negara, menjadi hal yang lumrah bila eksekutif dan legislatif dalam rancangan belanja daerah bisa saling bekerjasama membagi porsi bagian mana saja yang dikerjakan oleh eksekutif dan legislatif memberi lampu hijau terkadang juga ikut bagian ambil projek didalamnya.

Isu pembagian porsi belanja daerah bukan hanya isapan jempol belaka akan tetapi sudah banyak pejabat publik dan anggota dewan yang bersama-sama tersangkut kasus korupsi seperti kasus e-KTP adalah hasil kongkalikong antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah Dibawah Kementerian dalam negeri, kasus suap Akil Muktar dengan swasta menjadi catatan hitam tersendiri bagi keadilan dimasyarakat dimana sebagai pejabat hukum tertinggi di negeri ini seharusnya memberikan etika yang baik. Namun sebaliknya kasus yang menyimpannya ini membuat apatisisme masyarakat terhadap permasalahan hukum dan politik, selaras dengan teori sarana pencapaian tujuan diatas

dalam praktik penyelenggaraan negara sangat tidak baik kondisi itu menggambarkan bahwasanya keputusan-keputusan yang dibuat adalah hanya untuk kepentingan individu dan kelompok semata hal ini merupakan praktik politik yang tidak bermoral karena dalam keputusan yang diambil tidak akuntabilitas.

Akhir-akhir ini pemerintahan pusat sedang gencar-gencarnya dikritik oleh masyarakat, kenaikan BBM, Listrik, perubahan aturan BPJS bisa dianggap tidak berpihak kepada masyarakat tingkat bawah. Aksi politik para politisi pemangku kepentingan tidak memperhatikan rasional politik dimana masyarakat saat ini rawan akan perpecahan, munculnya politik identitas mempertajam fiksi didalam masyarakat. Banyaknya kebijakan yang tanpa disosialisasikan dengan baik terlebih seakan ditutupi akan menjadi bom waktu protes aksi dimasyarakat, seharusnya tanggung jawab moral ini haruslah dipanggul oleh politisi yang menjadi pejabat publik bukan lantas masyarakat yang harus menanggung sepenuhnya karena pada hakikatnya tujuan suatu negara adalah mensejahterakan masyarakatnya.

Yang cukup memprihatinkan adalah atmosfir mendekati pilihan presiden yang akan datang suhu politik dirasa cukup panas, tidak jadinya Mahfud MD menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Jokowi menjadi tamparan keras bagi partai politik pendukungnya, karena bila melihat proses perekrutan cawapres sudah dipastikan 99% melenggang menjadi calon wakil presiden dengan pertimbangan beberapa hasil survey menyebutkan Mahfud MD selalu polling teratas,

hanya 1% yang menjadi pertimbangan partai politik dalam mengambil aksi dan keputusan politik yakni ketakutan mereka di periode pemilihan yang akan datang tidak ada kader partai yang kapasitasnya sebanding dengan Mahfud MD. Aksi politik ini sangat mencederai masyarakat, dimana tanggung jawab moral yang harusnya mencari pemimpin yang dikehendaki rakyat pada kenyataannya diabaikan. Hal ini nantinya bisa jadi dapat berdampak pada penurunan perolehan atau target suara yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Aksi politik ini menggambarkan rasionalitas dikalahkan oleh persepsi kepentingan.

SIMPULAN

Melihat sepak terjang elit politik di Indonesia perlu dilakukan perbaikan dan kesadaran bersama bahwa etika harus dikedepankan sebelum melakukan suatu tindakan politik, sah-sah saja setiap warga negara menjadi politisi yang bercita-cita menjadi pemangku kekuasaan namun demikian seyogyanya mereka mempunyai pendidikan politik mumpuni dan melakukan politik santun sebagai budaya timur yang mempunyai unggah-ungguh didalam bermasyarakat. dengan kemampuan dan kapasitas yang baik membuat visi, misi, dan tujuan dari seorang politisi ini menjadi tanggung jawab moral kepada masyarakat. Perbaikan terhadap aturan yang dirasa kurang bermanfaat bagi masyarakat jangan hanya sebatas kepentingan pribadi, kelompok terlebih titipan tertentu yang merugikan banyak pihak, perilaku-perilaku pembuatan aturan secara sepihak inilah yang membuat celah seorang politisi melakukan korupsi. Oleh sebab itu kepentingan seperti itu

harus dilawan dengan mengingat tanggung jawab moral kepada masyarakat sebelum membuat suatu aturan. Begitu juga halnya dalam mengambil keputusan bilamana dianggap suatu aturan atau kebijakan yang akan diputuskan dipandang merugikan masyarakat alangkah baiknya keputusan tersebut ditiadakan dan dapat memformulasikan kebijakan baru yang mengedepankan kepentingan umum sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.

Selain itu bisa disarankan, partai politik sebagai distribusi politikus hendaknya mengevaluasi kembali sistem rekrutmen, seleksi diperketat ada tahapan-tahapan seorang kader bilamana akan maju sebagai calon wakil rakyat ataupun jabatan publik lainnya. Negara dan pemerintah sudah harus melinierkan terhadap posisi ataupun profesi jabatan publik sehingga politisi yang mengisi kedudukan tersebut sudah tidak lagi bermodal popularitas dan modal yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryatmoko. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan. *Kompas*. Jakarta.
- Magniz-Suseno, Franz. 1987. *Etika Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Sastroadmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP. Semarang.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sutarto. 2012. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Syamsuri. 2014. *Kepemimpinan Partisipatif dan Pendelegasian Wewenang*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

- Thoha, Miftah. 2013. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tohardi, Ahmad. 2012. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Umar, Husein. 2013. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wibowo, Udik Budi. 2014. *Teori Kepemimpinan*. BKD. Yogyakarta.
- Widayat. 2014. *Metode Penelitian Pemasaran (Aplikasi Software SPSS)*. Edisi Pertama. UMM Press. Malang.
- Widiawati Kristiana. 2016. Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Komunikasi Mempengaruhi Disiplin Kerja Guru di SMKN 6 Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Kantor*. Vol.4, No.2, Desember 2016. 393-417
- Winardi, 2013. *Pimpinan dan Kepemimpinan dalam Manajemen*. PT. Rineke Cipta. Jakarta.
- Dessler, Garry. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alih bahasa: Eli Tanya. Penyunting Bahasa: Budi Supriyanto. Indeks. Jakarta.
- Fathoni Abdurrahmat. 2015. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2014. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE. Yogyakarta.